

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skill Development Center atau SDC adalah lembaga non struktural yang dibentuk sebagai lembaga rujukan dalam peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh banyak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menginisiasi program SDC yang bertujuan meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan kerja sesuai pasar tenaga kerja dan menekan angka pengangguran serta simetrisasi sumber daya yang akan di implementasikan di daerah. SDC berperan sebagai penggerak dan fasilitator terhadap hasil dari program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang melibatkan kolaborasi dan koordinasi didalamnya.

Kesejahteraan dan layakny kehidupan penduduk di Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia, salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Keadaan ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai rintangan, meski demikian beberapa indikator menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia yakni tingginya tingkat pengangguran terutama dikalangan pemuda dan perempuan, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 6,8%. Tantangan kedua yakni sebagian tenaga kerja di Indonesia bekerja dalam sektor informal dan bekerja dengan kontrak sementara yang menyebabkan kurangnya perlindungan social dan keamanan bagi tenaga kerja, serta masih banyak pekerja di

Indonesia yang terlindungi dengan baik oleh undang-undang ketenagakerjaan seperti hak untuk memilih, upah yang layak, dan bergabung dengan serikat pekerja. Kemudian perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menuntut perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan menyebabkan para pekerja harus mengembangkan keterampilan dan menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja¹. Berdasarkan tantangan tersebut pemerintah menanggapi dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, salah satunya yakni program SDC.

Konsep SDC juga bermula dari beberapa fenomena yang menjadi sorotan oleh Kementerian Ketenagakerjaan², yakni tingginya angka pengangguran terdidik khususnya lulusan SMK 11,13% di atas tingkat pengangguran nasional yang berjumlah 6,49% (Data Sakernas Periode Agustus 2021), tingginya *mismatch* kualifikasi tenaga kerja dan yang dibutuhkan industri menghambat transformasi 51,5% (2015) *underqualifield*, 40,0% sesuai, dan 8,5% *overqualifield*, kemudian menurunnya produktivitas tenaga kerja Indonesia sehingga menjadi yang terendah di Kawasan Asia, adanya *megatren* dan *future work* di depan mata, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengakibatkan sertifikat kompetensi kurang kredibel dan tidak diakui industri dan lulusannya sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki bekal cukup untuk berwirausaha.

¹ Al Qodri, *Implementasi Sistem Keadilan Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Vol. 20, 2022, Hal 127-128

² Paparan presentasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam Seminar Skill Development Centre (SDC) dengan tema “Rencana Implementasi Skill Development Centre (SDC) Kota Padang Tahun 2023” pada tanggal 6-7 Desember 2022.

Berdasarkan modul pedoman yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan salah satu prioritas pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah kualitas tenaga kerja. Dalam pembangunan, tenaga kerja memiliki peran ganda, yaitu sebagai subjek dan sekaligus objek dari pembangunan. Sebagai subjek, tenaga kerja adalah pelaku pembangunan yang oleh karenanya harus ditingkatkan kompetensi dan produktivitas kerjanya agar semua program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkualitas³. Sedangkan sebagai objek pembangunan, tenaga kerja harus dapat menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan, hidup layak, dan sejahtera bersama keluarganya serta pengembangan diri sebagai manusia seutuhnya⁴.

Menanggapi permasalahan mengenai tenaga kerja, salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah ialah dengan menyediakan pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah investasi sumber daya manusia sebagai kapital (*human capital investment*). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan kerja harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha⁵. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja maka sumber daya yang terserap di pasar kerja juga meningkat. Maka dari itu pelatihan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja cukup penting dan dibutuhkan keberadaannya saat ini.

Pada era industri 4.0 menimbulkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan (termasuk bidang ketenagakerjaan) dan ledakan penduduk usia produktif (bonus

³ Budi Hartawan. (2021). Modul Pedoman *Skill Development Center (SDC)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, hal. 11

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

demografi) membuat kebutuhan pelatihan kerja berkembang luar biasa, baik bidang, jenis, kualifikasi maupun jumlahnya, dan ditambah dengan dampak Pandemi Covid-19. Indonesia akan menjadi negara yang tua dan miskin bila tidak memanfaatkan peluang dari bonus demografi. Pelatihan vokasi menjadi solusi untuk percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil. Kebutuhan pelatihan tersebut tidak hanya untuk membekali tenaga kerja baru yang memasuki pasar kerja/dunia usaha (*Skilling*), tetapi juga untuk meningkatkan dan menyesuaikan kompetensi pekerja yang ada agar tetap eksis di pekerjaannya (*Up-skilling*). Di samping itu, kebutuhan pelatihan juga tumbuh dan berkembang untuk alih profesi (*Re-skilling*) bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat disrupsi industri 4.0⁶.

Kebutuhan *Triple Skilling* dalam penyelenggaraannya diperlukan infrastruktur lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang cukup besar, baik jumlah, bidang, jenis maupun kualifikasinya⁷. Oleh karena itu perlu dilakukan mobilisasi sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mobilisasi sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut di dalamnya terdapat harmonisasi, koordinasi dan sinegritas sejak dari perancangan program, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sampai dengan tindak lanjut ke pekerjaan lulusannya.

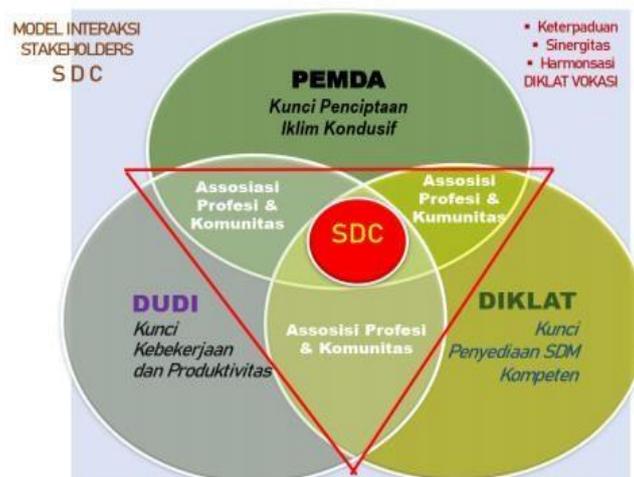
Sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi secara nasional tersebar di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta perusahaan dan masyarakat/komunitas. Sumber daya pendidikan dan

⁶ Ibid., hal.11

⁷ Ibid.

pelatihan vokasi tersebut diantaranya dalam bentuk Lembaga Pelatihan Kerja (BLK/LPK) dengan kapasitas pelatihan sekitar 5.345.880 orang/tahun⁸. Tersedianya modalitas peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut masih kurang optimal pemanfatannya akibat kurangnya koordinasi, sinergitas dan harmonisasi, baik pada tingkat kebijakan, program maupun kegiatan, bahkan regulasinya. Keseluruhan sumber daya nasional di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut mendesak untuk dilakukan mobilisasi dan penyeimbangan menuju kearah pencapaian kualifikasi kompetensi pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri serta Dunia Kerja (DuDi)⁹.

Kelembagaan SDC melibatkan 4 (empat) unsur utama pemangku kepentingan yaitu akademisi dan profesi, pebisnis, pemerintah dan masyarakat/komunitas (*Academy, Business, Government and Community* (ABGC)). Model interaksi para pemangku kepentingan dalam SDC sebagaimana gambar berikut:

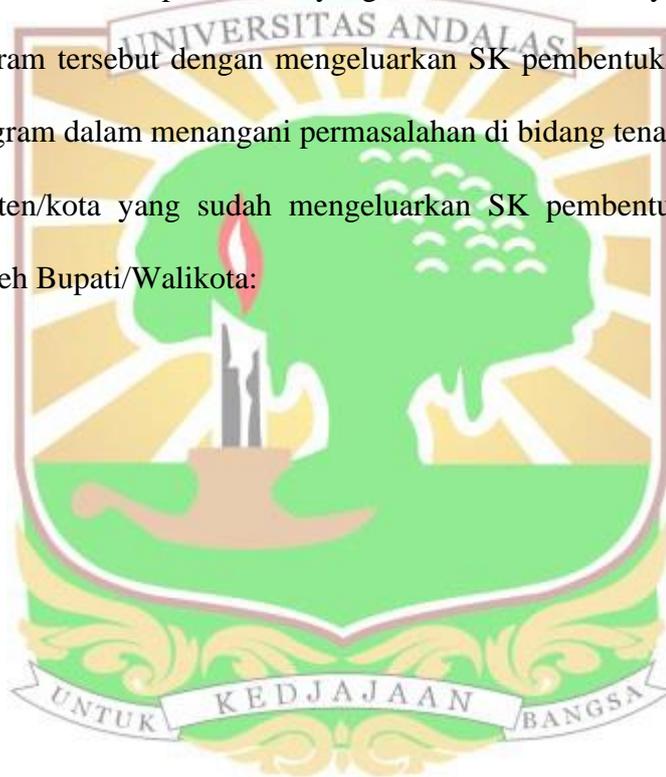


⁸ Ibid., hal. 14

⁹ Paparan presentasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker RI, dalam Seminar Skill Development Centre Tahun 2022

Sumber: Modul Pedoman Skill Development Center (SDC)

Pembentukan program SDC pada tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai bentuk lanjutan dari menanggapi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang kemudian diturunkan ke pemerintah Provinsi agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten /Kota. Beberapa pemerintah Kabupaten /Kota yang ada di Indonesia ada yang menanggapi hadirnya program tersebut dengan mengeluarkan SK pembentukan SDC sebagai salah satu program dalam menangani permasalahan di bidang tenaga kerja, berikut daftar kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan SK pembentukan SDC yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota:



Tabel 1.1
Daerah yang sudah mempunyai SK pembentukan SDC

NO	LOKASI	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS SK
1	Kab. Aceh Tamiang	2019	-
2	Kab. Bandung Barat	2019	-
3	Kab. Bantaeng	2019	Perlu Diperpanjang
4	Kota Bekasi	2019	Berlaku
5	Kab. Malang	2019	-
6	Kab. Sumedang	2019	-
7	Kab. Serang	2019	-
8	Kab. Karanganyar	2019	-
9	Kota Kendari	2019	Berlaku
10	Kota Makassar	2018	Perlu Diperpanjang
11	Kota Padang	2019	Berlaku
12	Kota Ternate	2019	Berlaku
13	Kab. Kulon Progo	2019	-
14	Kab. Lombok Timur	2019	-
15	Prov. Maluku	2019	Berlaku
16	Kab. Pakpak Bharat	2019	-
17	Kota Samarinda	2019	Perlu Diperpanjang
18	Kota Semarang	2020	-
19	Kota Surakarta	2018	Perlu Diperpanjang
20	Kota Sorong	2019	Berlaku

Sumber: Bahan Seminar SDC "Rencana Implementasi Skill Development Centre (SDC) Kota Padang Tahun 2023"

Berdasarkan tabel diatas Kota Padang menjadi salah satu kota yang memiliki SK pembentukan SDC, yang mana SK tersebut berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 561/287/LatPen/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Forum SDC Provinsi Sumatera Barat. Isi putusan tersebut ditetapkan bahwasanya unsur yang terlibat yakni *Academy* (Diklat) sebagai pembina, *Business* (DuDi) sebagai penggerak, *Government* (Pemerintah Daerah) sebagai pelaksana operasional. Surat Keputusan ditindaklanjuti dengan diadakannya Pengukuhan tim SDC Provinsi Sumatera Barat dan Pembukaan Sosialisasi SDC untuk

Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang dilaksanakan di Inna Muara Hotel Padang pada 18 November 2019 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat¹⁰.

Gambar 1.2

Pengukuhan Tim SDC Provinsi Sumbar dan Sosialisasi SDC Ke Kota dan Kabupaten Se Sumbar



Sumber: Nakertrans

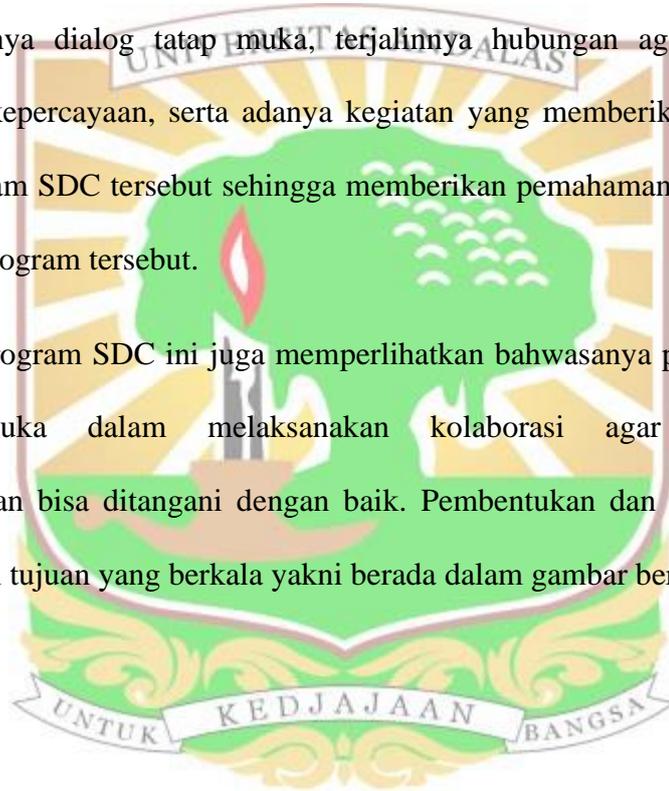
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Forum SDC, Pemerintah Kota Padang turut mengeluarkan kebijakan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 429 Tahun 2019 tentang Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Padang Periode 2019-2024. Sebagaimana panduan menjalankan program SDC yang menjadi awalnya ialah diadakannya sosialisasi terkait program SDC kepada seluruh *stakeholder* yang memiliki peran dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Kota Padang turut mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh unsur-unsur yang memiliki peran dalam pelaksanaan SDC di Kota Padang yakni dari akademisi, perusahaan, dan pemerintah atau lembaga. Sosialisasi sekaligus pembentukan tim SDC di Kota Padang ini diadakan di Hotel Amaris pada 20-21 November 2019. Kota Padang

¹⁰ Erizal, <https://nakertrans.sumbarprov.go.id/details/news/644>, diakses 29 Maret 2023, jam 10.10 WIB.

juga ditunjuk sebagai pilot proyek program SDC di Sumatera Barat, dikarenakan salah satu balai pelatihan atau BPVP berada di Kota Padang¹¹.

Pertemuan para pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian diikuti oleh pertemuan Pemerintah Kota Padang dalam menyambut adanya Program SDC, menjadi salah satu bentuk proses kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash 2008 dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice*, yakni terjadinya dialog tatap muka, terjalinnya hubungan agar dapat saling membangun kepercayaan, serta adanya kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang program SDC tersebut sehingga memberikan pemahaman bersama tujuan dari adanya program tersebut.

Adanya program SDC ini juga memperlihatkan bahwasanya pemerintah Kota Padang terbuka dalam melaksanakan kolaborasi agar permasalahan ketenagakerjaan bisa ditangani dengan baik. Pembentukan dan pengembangan SDC memiliki tujuan yang berkala yakni berada dalam gambar berikut:



¹¹ Hms/Je, <https://www.beritaminang.com/berita/1140/kota-padang-jadi-pilot-projeck-program-sdc.html>, diakses pada 29 Maret 2023, jam 10.20 WIB

Gambar 1.3

Tujuan, Fungsi, Kegiatan dan Sasaran Pengembangan SDC



Sumber: Modul Pedoman Skill Development Center (SDC)

Dengan peran dan fungsi SDC seperti di atas, diharapkan dapat tercapainya tujuan; 1) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, sesuai dengan kebutuhan DuDi (*link and match*), 2) Peningkatan kebhkerjaan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi, 3) Penurunan tingkat pengangguran, 4) Peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta 5) optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada.

Program SDC ini mampu membantu pemerintah Kota Padang dalam mengatasi pengangguran yang semakin banyak. Berikut adalah data jumlah pengangguran di Kota Padang:

Tabel 1.2
Data Penduduk Kota Padang

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pengangguran
2019	950,87	8,74%
2020	909,040	13,64%
2021	913,45	13,37%

Sumber: satudata.padang.go.id

Jumlah penduduk Kota Padang yang meningkat, diikuti oleh jumlah pengangguran yang semakin meningkat tiap tahunnya harus menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Padang karena hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 5 mengenai ketenagakerjaan yang mengandung isi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Berikut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang terkait jumlah angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

Tabel 1.3
Data Angkatan Kerja Kota Padang

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2021	416.090	13,37%
2022	480.376	11,69%

Sumber: Data Sakernas BPS Agustus 2022

Jumlah angkatan kerja yang bertambah sebesar 64.000 lebih diikuti dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 62,81% pada tahun 2022, memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Padang memperhatikan permasalahan ini dengan membangun sinergitas dengan pemangku kepentingan termasuk semua *stakeholder* ketenagakerjaan yang ada di pusat dan daerah. Fenomena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi harus cepat diatasi dan

cepat tanggap dalam menyediakan lapangan kerja agar bisa mengurangi jumlah pengangguran dan tidak meningkat setiap tahunnya.

Program SDC menjadi salah satu cara pemerintah Kota Padang yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi pengangguran, yang mana bukan hanya untuk mencarikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pencari kerja saja melainkan juga menyediakan pelatihan dan penempatan yang bisa diikuti pencari kerja dalam meningkatkan kualitasnya dan mempunyai bekal kemampuan dalam menghadapi dunia kerja maupun untuk membuka usahanya sendiri. Sesuai dengan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang itu sendiri yakni tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan dunia usaha, menjadikan instansi ini sebagai *leading* sektor dalam pelaksanaan program SDC di Kota Padang. Sebagai *leading* sektor dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terlibat dalam seluruh rangkaian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program SDC di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang yang menjalankan Program SDC terdapat dalam Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 429 Tahun 2019 Tentang Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Padang Periode 2019-2024 yakni terlampir berikut:

Gambar 1.4
Susunan Keanggotaan Forum SDC Kota Padang

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
A. PEMBINA		
1.	Wali Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sekretaris
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota
4.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Balai Latihan Kerja Padang	Anggota
9.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Bidang Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
12.	Ketua Yayasan Universitas Putra Indonesia	Anggota
13.	Ketua PHRI Kota Padang	Anggota
14.	Unsur Harian Pos Metro	Anggota
15.	Unsur PT, Abaisiat Raya	Anggota
16.	Unsur Baznas Kota Padang	Anggota
B. PENGGERAK		
1.	Ketua Kadin Kota Padang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Sekretaris
3.	Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Padang	Komite PTK
4.	Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Royal Asia	Komite Diklat
5.	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Tipe 2 Balai Latihan Kerja Padang	Komite Sertifikasi
6.	Kasi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Komite Pasar Kerja
C. PELAKSANA OPERASIONAL		
1.	Kepala Bidang Penempatan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Ketua
2.	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Padang	Sekretaris
3.	Unsur Balai Latihan Kerja Padang	Anggota
4.	Ketua Pusat Kajian Ekonomi Kreatif UNP	Anggota
5.	Pimpinan Usaha Tangkelek	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
7.	Fungsional Pengantar Kerja Disnakerin Kota Padang	Anggota
8.	Unsur Padang Creative City Forum	Anggota

Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 429 Tahun 2019

Pembagian keanggotaan dibagi menjadi tiga pengelompokan, yakni Pembina, penggerak, dan pelaksana operasional¹².

1. Pembina, yakni yang menetapkan kerangka regulasi daerah yang diperlukan serta memberikan arahan pelaksanaan SDC

¹² Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 429 Tahun 2019 Tentang Forum Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Padang Periode 2019-2024

2. Penggerak, yakni yang menyusun rencana kerja, melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan melakukan sinergi berbagai kebijakan/program pengembangan keahlian masyarakat atau tenaga kerja serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
3. Pelaksana Operasional, yakni yang melaksanakan pelatihan keterampilan, mengembangkan materi diklat berbasis standar kompetensi serta memfasilitasi sertifikat kompetensi.

Paparan tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan kolaborasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan bagi para aktor yang terlibat, karena aspek kolaborasi tidak hanya sampai pada pembuatan regulasi melainkan juga pada tahap mengidentifikasi data, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya, serta sampai dengan pemantauan dan evaluasi pun semua aktor kebijakan terlibat dan berada pada tujuan yang sama. Bentuk kolaborasi ini tampak dari sebuah acara seminar SDC yang diadakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang dengan tema “Rencana Implementasi *Skill Development Centre* (SDC) Kota Padang Tahun 2023”. Dalam seminar tersebut juga hadir Narasumber Perencana Ahli Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/BAPPENAS dan juga Koordinator Pengembangan Promosi Kerja Sama Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana hal ini sebagai wujud pemerintah pusat juga ikut andil dalam pembahasan perencanaan kegiatan program SDC di Kota Padang. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Disnakerin Kota Padang Dian Fakhri dengan mengatakan:

“Membangun sinergitas merupakan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Disnakerin Kota Padang mengadakan seminar SDC ini untuk dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kota Padang dan meningkatkan Up Skilling keterampilan bagi pencari kerja khususnya yang ada di Kota Padang.” (Kutipan wawancara Bapak Dian Fakhri selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam <https://www.padang.go.id/dalam-rangka-menekan-angka-pengangguran-pemko-padang-mengadakan-seminar-skill-development-centre-padang-sdc-tahun-2022>)

Dari hasil seminar tersebut juga didapatkan apa yang menjadi kebutuhan dari para pemangku kepentingan yang disalurkan ke dalam SDC dalam bentuk Program Latihan (Proglat) yang diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Berikut Proglat yang menjadi kebutuhan para pemangku kepentingan:



Tabel 1.5

Rekap Kebutuhan Pelatihan dan Keterampilan SDM di Instansi Kota Padang dan Perwakilan Lembaga dan Asosiasi Tahun 2023

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Bidang Kompetensi Apa Yang Dibutuhkan Di Instansi/Lembaga/Perusahaan/Komunitas	Apakah Menurut Instansi/Perusahaan Perlu Upgrading Sdm Penting	Berikan Penjelasan Dan Masukan Atas Jawaban Penting Atau Tidaknya Upgrading	Ket
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Bahasa	Penting	Penting sekali untuk kebutuhan pemberangkatan PMI kerja keluar negeri dan DUDI	
2.	Dinas Pariwisata Kota Padang	Kebutuhan pelatihan khusus ekonomi kreatif, seperti digital marketing, design grafis, jurnalistik, dll yang menunjang 17 Bidang Ekraf yang ada di Youth Centre sekaligus untuk tenaga instruktur yang kompeten untuk bekerja di youth centre membantu anak-anak/Masyarakat Kota Padang yang ingin belajar.	Penting	Keadaan di Youth Centre saat ini 17 Bidang Ekraf tidak ada instruktur yang kompeten disana jika sewaktu-waktu dibutuhkan bagi masyarakat Kota Padang untuk bertanya atau belajar.	
3.	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	Kebutuhan pelatihan manajemen kewirausahaan dan digital marketing serta design grafis, bagi UMKM Kota Padang	Penting	Keadaan produk UMKM Kota Padang belum bisa untuk membuat produk yang baik supaya produk bisa dipasarkan dengan tampilan menarik dan bisa dipromosikan dengan baik.	
4.	Dinas Pertanian Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan service traktor roda 4 dan roda 2 (teknisi) 2. Pelatihan inseminator 3. Pelatihan pengolahan hasil cangkak/kulit kakao pakan ternak 4. Pelatihan kulit manggis menjadi kosmeti 	Penting	Kondisi untuk tahun 2023 tidak semua pelatihan untuk tenaga dan teknisi ini diakomodir APBD dan APBN	

5.	Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Kebutuhan pelatihan bagi nelayan, seperti mesin tempel dan pengolahan ikan	Penting	Karena keterbatasan anggaran APBD 2023 tidak semua kelompok nelayan yang bisa diberikan pembekalan pelatihan
6.	DPD HILLSI Sumbar	Web Programmer, design grafis, android programmer (IT)	Penting	Sangat penting karena permintaan pasar selalu berkembang setiap tahunnya untuk itu SDM juga harus upgrade imunya masing-masing
7.	LPK Engineering	IT, Body Repair and Paint	Penting	Sesuai kebutuhan DUDI
8.	Kadin Sumbar	Design Komunikasi Visual/Vokasi	Penting	Untuk meningkatkan mutu pencaker
9.	CV. Tjahaja Baru	Teknisi	Penting	Karena terkait dengan perkembangan teknologi
10	Semen Padang	Bidang Mekanikal dan Elektrikal	Penting	Agar dapat bersaing dengan kompetitor lain
11	Komite Ekraf Kota Padang	Digital Marketing	Penting	Dunia usaha semakin kompetitif dan cepat berubah, peningkatan kompetensi SDM harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, baik menyangkut skill atau penguasaan teknologi, penting sekali upgrading SDM terkait hal ini
12	Asosiasi HRD Hotel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi instruktur pelatihan 2. Kompetisi metodologi pelatihan 3. Kompetisi Human Resources Manager (HRM) 	Penting	Upgrading skill untuk sebuah kompetensi kerja sangat penting karena sebagai contoh komunitas HRD yang mengelola SDM harus terus berkembang agar perusahaan mendapatkan SDM yang bermutu dan konsisten dalam bekerja.

Sumber: Bahan Seminar SDC 2022

Berdasarkan data rekap kebutuhan tersebut belumlah cukup untuk memberikan informasi bagaimana kesepakatan yang akan dijalani dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut oleh para *stakeholder*, sehingga hasil rekap tersebut belum menunjukkan bagaimana kolaborasi antar *stakeholder* dalam memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini merupakan salah satu akibat dari pemahaman dan partisipasi mengenai fungsi dan peran SDC yang masih samar dan ini menjadi sebuah permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi sebagaimana berdasarkan teori proses kolaborasi oleh Ansell dan Gash yang peneliti gunakan untuk menganalisis hal tersebut dimana terdapat empat variabel didalamnya yaitu kondisi awal kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional dan proses kolaborasi. Permasalahan yang peneliti amati dari hasil rekap kebutuhan diatas ialah belum maksimalnya variabel proses kolaborasi terkait pemahaman bersama oleh para *stakeholder* sebagai salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan kolaborasi untuk tercapainya tujuan bersama.

Jika dilihat dari kondisi awal berkolaborasi, berkaitan dengan ketidakseimbangan sumber daya. Dalam hal ini masing-masing aktor mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk berkolaborasi. Namun dapat dikatakan terjadi ketidakseimbangan sumber daya dalam pelaksanaan program *Skill Development Centre (SDC)*, dimana kekuatan masing-masing aktor jelas berbeda dengan aktor lainnya. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai tujuan yang sama, yang nantinya dapat mempengaruhi insentif mereka untuk berpartisipasi.

Ketidakseimbangan sumber daya tersebut dapat terlihat dari perbedaan kapasitas dan kemampuan para aktor dalam bekerja sama. Dalam kolaborasi pelaksanaan program SDC ini, ketidakseimbangan tersebut terlihat dari sisi pemerintah yang memerlukan pelatihan untuk memenuhi permintaan DuDi (Dunia Usaha dan Dunia Industri) yang membutuhkan tenaga kerja dan hal tersebut bisa diatasi dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mampu menyediakan pelatihan tersebut.

Program SDC ini sudah dibentuk dari tahun 2019 namun dalam pengimplementasiannya program SDC terhambat dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat adanya pemangkasan anggaran untuk program SDC di Kota Padang. Kemudian pertemuan para stakeholder secara keseluruhan belum sering dilakukan, yang menyebabkan kurang lancar atau intens pertemuan seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan forum SDC tersebut. Ketidakcocokan jadwal antar stakeholder sebagaimana salah satu kendala yang dipaparkan dalam seminar Rencana Implementasi Program SDC Kota Padang 2023 oleh Disnakerin Kota Padang, yang membuat pertemuan yang diadakan kurang tercapai tujuannya akibat kurangnya stakeholder yang ikut dalam pertemuan dan hal ini juga menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi oleh para stakeholder.

Penelitian terkait dengan program SDC masih sangatlah minim, daerah yang menjadi objek penelitian terkait program SDC ini salah satunya Kabupaten Bandung Barat karena permasalahan pengangguran di Kabupaten Bandung Barat yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah daerah menjadikan program SDC ini sebagai peluang yang menjanjikan sebagai solusi dari permasalahan daerah tersebut.

Ditemukan ada beberapa peneliti yang membahas adanya serta jalannya program tersebut di daerah Kabupaten Bandung Barat, seperti Shandira Malikul Mulkis yang membahas tentang Implementasi Program Pemerintah Daerah tentang *Skill Development Centre* Di Kabupaten Bandung Barat¹³. Lukman Nurhakim yang membahas Inovasi Program *Skill Development Centre* (SDC) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat¹⁴. Kemudian penelitian oleh Serly Wulandari, Saadah Oktaviani, dan Mubarak R. Adam yang membahas

¹³ Shandira Malikul Mulkis. 2020. *Implementasi Program Pemerintah Daerah tentang Skill Development Centre Di Kabupaten Bandung Barat*. Skripsi.

¹⁴ Lukman Nurhakim. 2021. *Inovasi Program Skill Development Centre (SDC) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat*. Skripsi. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati

tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development Centre (SDC) Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat¹⁵.

Pengkajian tentang program SDC yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu membuat peneliti terdorong melakukan penelitian ini, sebagaimana pemerintah Kota Padang juga memiliki SK terhadap pelaksanaan program SDC dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sebagai *leading* sektor dalam pelaksanaan program SDC di Kota Padang. Didukung dengan adanya satu unit BPVP atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di Kota Padang, dimana seharusnya membuat kolaborasi program SDC bisa berjalan dengan baik dengan seluruh *stakeholder* karena memiliki keunggulan dalam memberikan pelatihan atau memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh para *stakeholder*. Dalam proses kolaborasi juga dituntut untuk para *stakeholder* agar bisa komitmen dalam melaksanakan kolaborasi agar tujuan dari pelaksanaan program SDC tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam pelaksanaan program SDC di Kota Padang dengan menggunakan teori oleh Ansell dan Gash yakni variabel proses kolaborasi dalam *collaborative governance* yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil antara, serta variabel lainnya sebagai pendukung kolaborasi dalam mengetahui bagaimana jalannya kebijakan tersebut melalui proses kolaborasi.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul ***Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Skill Development Center (SDC) Di Perindustrian Kota Padang.***

¹⁵ Wulandari, S., Oktaviani, S., & Adam, M. R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development Centre (Sdc) Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 14, No. 2, 310-333.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang yaitu: Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program SDC di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan kolaborasi oleh para *stakeholders* pada *collaborative Governance* dalam program SDC di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam beberapa manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait *collaborative Governance* dalam pelaksanaan SDC di Kota Padang. Sehingga nantinya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti terhadap kolaborasi kebijakan publik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan yang menjadi unsur dalam pelaksanaan SDC terutama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang secara khusus dan bagi pemerintah Kota Padang agar bisa melakukan perbaikan dan meningkatkan hasil dari pelaksanaan program SDC di Kota Padang.